

**LAPORAN SINGKAT
DELEGASI DPR RI KE
THE 9TH SESSION OF PARLIAMENTARY UNION OF OIC MEMBER STATES
(PUIC)
TEHERAN - IRAN, 14-19 FEBRUARI 2014**

Pada tanggal 14 sampai dengan 19 Februari 2014, Delegasi DPR-RI telah menghadiri rangkaian *the 9th Session of Parliamentary Union of OIC Member States and related meetings* di Teheran - Iran. Konferensi ke-9 PUIC ini dihadiri oleh 46 parlemen anggota PUIC. Delegasi DPR-RI dipimpin oleh Dr. Mohamad Sohibul Iman, Wakil Ketua DPR-RI, didampingi oleh KH. DR. Surahman Hidayat (Ketua BKSAP), Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si, Ir. Nova Iriansyah, Tantowi Yahya, Muhammad Oheo Sinapoy, Nazarudin Kiemas, Dr. Ir. Arif Budimanta dan Muhammad Nadjib.

Sidang Executive Committee dan Konferensi dipimpin oleh Ketua Parlemen Iran, Dr. Ali Larijani. Sidang dibuka secara resmi oleh Presiden Iran, H.E. Mr. Hassan Rouhani, pada tanggal 18 Februari 2014.

Delegasi DPR-RI dalam *the 31st Meeting of the PUIC EXCOM* menyampaikan antara lain:

- a. Menjadikan resolusi-resolusi yang belum terlaksana sebelumnya oleh PUIC sebagai prioritas untuk tahun 2014, terutama mengenai rencana kunjungan para Ketua Parlemen PUIC ke Jalur Gaza. Usulan kunjungan ini mendapat dukungan dari Maroko, Sudan dan Aljazair.
- b. Pembahasan agenda agar didasarkan pada isu-isu global terkini dengan skala prioritas. Dalam kaitan tersebut diusulkan pula agar dikemudian hari tidak terjadi kembali pengulangan pembahasan isu.
- c. Usulan pembahasan pemberian bantuan kemanusiaan oleh negara-negara PUIC kepada rakyat Suriah, Tunisia, Sudan dan Afrika tengah.

Pada sore hari, tanggal 14 Februari 2014, diselenggarakan Pertemuan Standing Committee on Palestine. Dalam sidang ini, Delegasi DPR-RI memberikan pandangan tentang perlunya negara-negara anggota PUIC mendesak Mesir agar membuka akses ke Jalur Gaza yang terisolasi sejak tahun 2007. Selain itu sidang komisipun juga membahas rencana kunjungan ke Jalur Gaza. Pihak Otoritas Palestina menyambut baik rencana dimaksud dan bersedia membantu terlaksananya kunjungan tersebut. Bahkan sidang komisi ini mengusulkan pembentukan Delegasi PUIC ke Mesir untuk kunjungan ke Jalur Gaza dan gagasan kunjungan ke Al-Quds Al-Sharif. Selain itu, komisi Palestina juga membahas tentang kurikulum pendidikan di negara-negara Timur Tengah untuk mengedukasi masalah Palestina. Hal ini dinilai amat penting agar generasi mendatang memahami masalah yang dihadapi bangsa Palestina.

Delegasi DPR-RI aktif menghadiri Sidang-sidang komisi baik Sidang Komisi Ekonomi dan Lingkungan Hidup dan Komisi Politik. Salah satu masukan yang disampaikan Delegasi DPR-RI dalam Komisi Politik antara lain:

- *Perlunya* rekonsiliasi antara faksi-faksi pejuang Palestina.
- Menghimbau agar tidak membeli *property* di pemukiman *illegal* Israel di tanah Palestina seperti tertuang pada *operative paragraph* ke-8 dalam *Draft Resolution No.2-PFR/9-CONF on The Role of Muslim Parliaments in Confronting Israeli Plans Concerning Jewishness of Israel and Judaization of Al-Quds*. Usulan Indonesia tersebut merupakan

- upaya untuk mengkampanyekan anti pembangunan permukiman Israel di tanah Palestina.
- Indonesia juga berhasil menambahkan satu *preamble paragraph* yaitu terkait urgensi pendirian sebuah saluran televisi global yang dimiliki oleh PUIC untuk mengimbangi *propaganda* yang dilakukan oleh media / televisi Barat terhadap Islam.

Sidang juga merespon perkembangan terkini yang menjadi konsen dunia Islam yaitu: situasi di *Central African Republic*, kerja sama antara PUIC dengan the OIC Media Forum (OMF), urgensi jaringan penelitian data-data keparlemenan PUIC, dan Brotherhood Charter.

Pada sesi penyampaian pidato oleh Ketua-ketua Delegasi, pada Konferensi ke-9 PUIC, Wakil Ketua DPR-RI, selaku Ketua Delegasi DPR-RI, menyampaikan antara lain menjelaskan tentang posisi Indonesia dalam isu Palestina, khususnya tentang situasi kota Al-Quds Al-Sharif dimana Parlemen Indonesia mendukung realisasi *Concept Paper* yang disiapkan oleh Sekretariat OKI dan mendorong agar PUIC mendukung hasil dari *the 20th Session of Al-Quds Committee* di Marakesh sebagaimana tertuang di dalam *Final Communique*. Lebih jauh, Delegasi DPR-RI menghimbau dunia internasional agar melarang warga negaranya membeli *property* di pemukiman illegal Israel di tanah Palestina. Selain itu, Delegasi DPR-RI menganjurkan agar didirikan suatu jaringan TV Parlemen PUIC yang memiliki jangkauan global agar dapat mengimbangi berita miring / propaganda Barat terhadap Islam. Secara ekonomi, pihak Delegasi DPR-RI juga mendorong ditingkatkannya Intra-trade diantara negara-negara anggota PUIC.

Di sela-sela sidang the 9th Session of the PUIC Conference, diadakan pertemuan bilateral antara Wakil Ketua DPR-RI, Bapak Mohamad Sohibil Iman dengan Ketua Parlemen Iran, Ali Larijani. Ada 3 hal yang mengemuka dalam pertemuan ini antara lain:

- a. **Keimigrasian.** Wakil Ketua DPR-RI menjelaskan bahwa isu-isu keimigrasian telah dibicarakan kedua belah pihak dalam forum *Development Eight (D-8)*
- b. **Investasi.** Ketua Parlemen Iran menyampaikan bahwa KADIN Iran telah melakukan kunjungan balasan ke Indonesia guna membahas investasi Iran di Indonesia. Kedua negara akan menindaklanjuti dengan melakukan kunjungan anggota Kabinet beserta menteri ke Iran.
- c. **Pertukaran tahanan.** Dalam kaitan ini Ketua Parlemen Iran mengangkat hal tentang pertukaran tahanan dan akses kemudahan bagi keluarga tahanan untuk bisa mengunjungi Indonesia. Wakil Ketua DPR-RI menjelaskan bahwa beberapa bulan lalu telah dilakukan pertemuan antara pemerintah Iran dan Indonesia di Jakarta, dan saat ini pihak Pemerintah RI telah menindaklanjuti hal ini ke seluruh Kementerian/Lembaga terkait di Indonesia. Wakil Ketua DPR-RI menilai perlu adanya payung hukum yang dapat menjadi landasan hukum bagi pertukaran tahanan ini. Oleh karena itu perlu adanya pertemuan-pertemuan lebih lanjut.